

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Menurut Aprilyada et al., (2023:165) mendefinisikan kajian pustaka sebagai sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain.

2.1.1. Ukuran Perusahaan

2.1.1.1. Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Khamisah et al., (2020:19) pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada total asset perusahaan yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*)”.

Menurut Cahyadi et al., (2020:10) pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

“Definisi dari ukuran perusahaan ialah sebuah pengukuran dengan mengelompokkan besar dan kecilnya suatu entitas dan menggambarkan berbagai aktivitas serta laba entitas tersebut. Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam menghasilkan laba, artinya semakin besar penghasilan bersih suatu entitas maka semakin berukuran besar pula perusahaan tersebut.”

Jadi dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang ditentukan oleh indikator-indikator tertentu seperti tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja, jumlah aktiva dan rata-rata total aktiva di akhir tahun.

2.1.1.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan berdasarkan kepemilikan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, perusahaan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar. Masing – masing Usaha dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.1.3. Kriteria Ukuran Perusahaan berdasarkan Kekayaan Aset dan Hasil

Penjualan Tahunan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.1.4. Indikator Ukuran Perusahaan

Menurut Menurut Indriyanti et al., (2020: 1562) Ukuran perusahaan Indikator ukuran perusahaan yang digunakan adalah Ln total Aktiva, dengan tujuan agar meminimalisir perbedaan ukuran perusahaan besar dengan perusahaan kecil.

Menurut Saputra et al., (2020 : 288) indikator ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aktiva)}$$

2.1.2. Komite Audit

2.1.2.1. Definisi Komite Audit

Komite Audit didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 berbunyi :

“... bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dimana komposisi, struktur, dan keanggotaannya sebagai berikut: a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, c. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen”.

Menurut Sijabat et. al., (2022:4) mendefinisikan komite audit sebagai berikut :

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas tugas khusus atau jumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan.

2.1.2.2. Tugas Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (2022) Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal dan memiliki tugas dimana komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan

terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi dengan tugas Komite Audit sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat Independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.2.3. Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Menurut BEI (2020:5) Wewenang Komite Audit meliputi :

- a) Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan

- b) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko , dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

2.1.2.4. Indikator Komite Audit

Menurut Subramaniam, et al., (2009) menyatakan indikator komite audit adalah sebagai berikut :

“ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk dewan komisaris yang ditunjukkan untuk manajemen risiko”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Cahyati et. al., (2021:52) yang menyatakan bahwa komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang dianggap dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

$$\text{Komite audit} = \sum \text{Jumlah anggota komite}$$

2.1.3. Manajemen Laba

2.1.3.1. Definisi Manajemen Laba

Menurut Felicya dan Sutrisno (2020:131) manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan atau menurunkan laba yang dilakukan sebelum melaporkan laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan manajemen. Menurut Alfarizi (2021:900) manajemen laba diungkapkan sebagai usaha memanipulasi laba, terutama terkait pendapatan jangka pendek yang dilakukan

manajemen dengan membuat suatu kebijakan tertentu guna mempercepat transaksi biaya atau pendapatan, atau menggunakan metode lain.

Manajemen laba juga didefinisikan oleh Wawo (2023:1) sebagai berikut :

“Manajemen laba adalah pengaturan laba yang dilakukan oleh manajemen agar laba yang dilaporkan sesuai dengan harapan pemegang saham, investor, kreditor dan pemerintah dengan melakukan perubahan kebijakan dan prosedur akuntansi yang digunakan atau mengatur transaksi bisnis riil perusahaan. Laba yang diharapkan bisa berupa laba yang tercantum dalam kontrak dengan pemegang saham, prediksi laba dari proyeksi laba tahun sebelumnya atau laba yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini otoritas pajak”

Dari ketiga teori diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi atau melakukan penyesuaian pada laporan keuangan untuk mencapai laba yang diinginkan. Tentunya manajemen laba dapat membuat laporan keuangan menjadi bias dan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

2.1.3.2. Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2015) terdapat empat pola dalam manajemen laba yang biasa terjadi yakni:

1) *Taking a Bath*

Pola *taking a bath* terjadi disaat suatu perusahaan mengalami penyusunan kembali organisasi perusahaan seperti penggantian CEO atau Direksi lainnya. Pola ini dilakukan dengan melaporkan kerugian sebesar-besarnya dalam periode berjalan dengan mengakui secara akrual biaya-biaya yang akan datang.

2) *Income Minimization*

Pola ini biasa dipilih perusahaan saat mereka mengalami peningkatan profitabilitas yang tinggi. Perusahaan dapat memilih beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dapat menunjang meminimalisasi pendapatan seperti pemilihan metode penyusutan, pengakuan harga pokok perolehan hingga mempercepat pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dapat dikapitalisasi dimasa mendatang seperti biaya *R&D* dan biaya sewa.

3) *Income Maximization*

Pola ini dapat menjadi pilihan bagi manajemen suatu perusahaan apabila laba perusahaan sedang mengalami penurunan dengan tujuan pencapaian bonus, perlindungan atas pelanggaran kontrak dengan memaksimalkan laba bersih. *Income maximization* ini berbanding terbalik dengan *income minimization*, dimana perusahaan akan cenderung mengkapitalisasi biaya-biaya yang dianggap dapat diamortisasi di periode mendatang. Dalam hal menghindari dari pemeriksaan, *income maximization* juga dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari lebih bayar dalam SPT Tahunannya.

4) *Income Smoothing*

Pola ini merupakan salah satu pola yang paling sering digunakan oleh manajemen karena *income smoothing* dapat meminimalisir fluktuasi laba dan menghasilkan laba yang stabil bagi perusahaan.

2.1.3.3. Indikator Manajemen Laba

Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba merupakan salah satu cara manajemen perusahaan untuk mempengaruhi informasi laporan keuangan dengan tujuan mengelabui *stake holder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi Manajemen laba (Devanka et al., 2022:90). Pada penelitian kali ini diukur dengan discretionary accrual menggunakan *Modified Jones Model* yang dimodifikasi, karena model ini dianggap lebih baik di antara model yang lain untuk mengukur manajemen laba (Dechow, et al., 1995 dalam Widita, 2017). Adapun nilai *discretionary accrual* dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Mengukur nilai *discretionary accrual* adalah sebagai berikut:

$$TA = Nit - CFO_{it}$$

Keterangan:

TA = *Total Accrual*

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada periode t

- 2) Mengukur nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta REV/A_{it}) - \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + e$$

- 3) Mengukur nilai *non-discretionary accrual* (NDA) adalah sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1})$$

- 4) Mengukur nilai *discretionary accrual* (DA) adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - NDA$$

Keterangan:

T_{ait} = Total accrual perusahaan i pada periode t

N_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t = Aset Tetap perusahaan pada tahun t (*property, plant, and equipment*).

DA_{it} = Discretionary Accrual perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} = Non-Discretionary Accruals perusahaan pada periode ke t

2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut Syahputri et al., (2023:161) pengertian kerangka berpikir adalah sebagai berikut :

“Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.”

Sedangkan Menurut Sugiyono (2019) mendefinisikan kerangka berpikir sebagai berikut :

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.”

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran peneliti berdasarkan fakta, observasi dan kajian kepustakaan yang dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan.

2.2.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian Hidayatullah, M. R.,(2023) menyatakan bahwa :

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan ukuran suatu perusahaan belum tentu mampu menjadi tolok ukur perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Penyebab tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap manajemen laba disebabkan karena pandangan berbeda yang dimiliki oleh beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan memiliki pandangan apabila total aset yang dimiliki semakin banyak, perusahaan akan khawatir dalam melakukan manajemen laba karena perhatian dari pihak luar akan semakin tinggi. Beberapa perusahaan lainnya berpandangan bahwa melalui peningkatan aset dapat menjadi media dalam melakukan manajemen laba. Selain itu, perusahaan yang lebih besar akan cenderung mempertahankan kondisi perusahaan pada tingkatan stabil dikarenakan stakeholder lebih menyukai kondisi pertumbuhan perusahaan yang relatif stabil. Hal ini menyebabkan manajemen dalam perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan manajemen laba, sebaliknya perusahaan yang lebih kecil dapat melakukan hal yang sama dengan melakukan manajemen laba agar perusahaan dipandang bagus oleh stakeholder terkait.

Rachmalia, A. M., & Nursiam, N. (2024) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba bahwa :

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ukuran Perusahaan menunjukkan besarnya informasi dari total aset Perusahaan. Sehingga ukuran Perusahaan menjadi bagian atau perhatian Masyarakat terkait dengan kinerjanya. Maka semakin mendorong Perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dan cenderung melaporkan kondisi keuangan dengan akurat.

2.2.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 berbunyi bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dimana komposisi, struktur, dan keanggotaannya sebagai berikut:

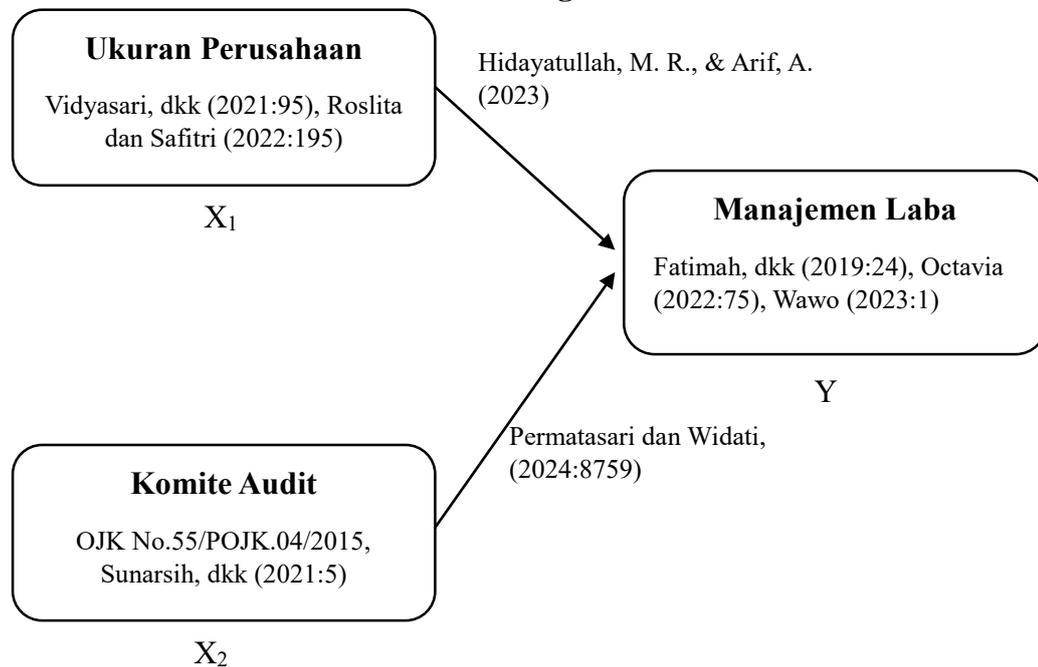
- a) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris
- b) Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik,
- c) Komite Audit diketuai oleh komisaris independen.

Menurut Permatasari dan Widati, (2024:8759) menyatakan bahwa :

Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite audit di perusahaan publik saat ini masih sekedar untuk memenuhi ketentuan pihak pemerintah saja. Dalam hasil penelitian ini menurut teori agensi jika komite audit melakukan pertemuan 4 kali dalam setahun belum tentu dalam rapat menghasilkan keputusan atau peraturan yang dapat meminimalisir tindakan praktik manajemen laba, oleh karena itu perusahaan akan tetap melakukan praktik manajemen laba.

2.3. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka didapatkan paradigma penelitian yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.4. Hipotesis

Menurut Djaali (2021:15) hipotesis didefinisikan sebagai sebuah pernyataan mengenai karakteristik populasi yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis berikut:

H₁ : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.

H₂ : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

